

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nomor SOP	: 6 Tahun 2025	
Tanggal Pembuatan	: 3 Januari 2025	
Tanggal Revisi	KABUPA	
Tanggal Efektif	: 3 Januari 2025	
Disahkan oleh	: Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman SEKRETARA Tres Natalia Situmorang	
Nama SOP	: Maklumat Pelayanan Informasi Publik	

		Ivalia 301	. Walturiat i Clayarian mornasi i ubik			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSA	NAAN				
<ol> <li>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</li> <li>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 197 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman</li> </ol>		-Undang Nomor 14 Tahun 200 n memahami pedoman penge	08 Tentang Keterbukaan Informasi Publik elolaan layanan informasi			
CE LEISTONIAN .	PERALATAN / PERLENGKAPAN					
- SOP Permintaan Informasi Publik - SOP Pengumuman Informasi Publik	<ul><li>1 Lembaran Kerja dan</li><li>2 Term Of Reference</li></ul>	Rencana Kerja				
- SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik	3 Alat Tulis Kantor					
- SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik	4 Komputer					
	5 Jaringan Internet					
	LAMPIRAN					
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi	Disimpan dalam bentuk s	softcopy dan hardcopy				

NO		PELAKSANAAN		MUTU BAKU			
	KEGIATAN	PPID/ PPID PELAKSANA	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KET
1	PPID Pelaksana wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayananan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik, paling sedikit memuat sebagai berikut:  a) Dasar hukum; b) Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan; c) Jangka waktu penyelesaian; d) Biaya/tarif; e) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; f) Evaluasi kinerja pelaksana. Rancangan Maklumat Pelayanan Informasi Publik disampaikan ke Atasan PPID untuk disetujui dan disahkan					Rancangan Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
2	Atasan PPID menelaah dan menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya			Rancangan Maklumat Pelayanan Informasi Publik		Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Badan Publik/PPID/PPID Pelaksana wajib mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan melalui papan pengumuman, laman resmi website PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman serta wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Setiap hari dan jam kerja	Maklumat Pelayanan Informasi Publik dapat diakses masyarakat	